

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI.....	iii
KETERANGAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN TAHAP I (TERTUTUP)	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN TAHAP II (TERBUKA).....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
SUMMARY	x
RINGKASAN.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xxiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxiv
DAFTAR PUTUSAN	xxx
DAFTAR TABEL	xxxi
DAFTAR GRAFIK	xxxii
DAFTAR SINGKATAN	xxxiii
DAFTAR ISI	xxxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	16
1.6. Metode Penelitian.....	24
1.6.1. Tipe Penelitian.....	24
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	25
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	29
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	30
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	31
1.7. Sistematika Penulisan	32

BAB II KEPENTINGAN NASIONAL BERLANDASKAN KONSTITUSI PADA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	33
2.1. Landasan Filosofis Kepentingan Nasional atas Sumber Daya Alam Berlandaskan Konstitusi	33
2.2. Kepentingan Nasional di Berbagai Negara.....	48
2.3. Hak Penguasaan Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	64
a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Minyak dan Gas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	66
b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	71
c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU- XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	75
d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	77
2.4. Kepemilikan atas Sumber Daya Alam Sektor Pertambangan Minerba yang Memperhatikan Kepentingan Nasional.....	90
2.4.1. Mineral dan Batubara Sebagai Kekayaan Negara yang Penting	90
2.4.1.1. Pertumbuhan Investasi Asing di Indonesia	94
2.4.1.2. Negara Investor Terbesar dalam 10 Tahun.....	96
2.4.1.3. Pendapatan Negara Sektor Pertambangan dalam 10 Tahun Terakhir	98
2.4.1.4. Cadangan Pertambangan Indonesia Hingga 10 Tahun Kedepan.....	101
2.4.1.5. Pengaturan Bagi Hasil Daerah Pada Sektor Pertambangan	105
2.4.1.6. Empat Besar Daerah Penghasil Mineral dan Batubara.....	110

2.4.1.7. EITI Indonesia (<i>Extractive Industries Transparency Initiative</i>).....	114
2.4.2. Pemilikan Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	116
2.4.3. Pemilikan Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	121

BAB III PRINSIP DIVESTASI SAHAM SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.....	129
3.1. Sejarah Ketentuan Divestasi Saham Sektor Pertambangan di Indonesia.....	129
3.1.1. Pengaturan Divestasi Saham dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	133
3.1.2. Pengaturan Divestasi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.....	140
3.1.3. Pengaturan Divestasi di Sektor Pertambangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	141
3.1.4. Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penentuan Harga Saham Divestasi di Sektor Pertambangan	148
3.1.5. Ketentuan Kewajiban Divestasi Saham dalam Kontrak Karya Pemerintah Indonesia dengan Freeport.....	151
3.2. Kendala Divestasi Saham Sektor Pertambangan.....	155
3.2.1. Manfaat yang Diharapkan Pemerintah dari Kebijakan Divestasi Saham Sulit Dicapai.....	156
3.2.2. Mewajibkan Divestasi Membebankan Biaya yang Besar bagi Indonesia.....	161
3.3. Kebijakan Divestasi Saham dengan Mekanisme <i>Public Choice Theory</i> (Teori Pilihan Publik) dan <i>Rational Choice Theory</i> (Teori Pilihan Rasional).....	166
3.4. Prinsip-Prinsip Divestasi Saham Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	185
3.4.1. Prinsip Kedaulatan Negara	185
3.4.2. Prinsip <i>Sovereignty Over Natural Resources</i> (SONR).....	195
3.4.3. Prinsip Perlindungan Keseimbangan Kepentingan (PPKK)	200

3.5. Rekomendasi Divestasi Saham Pertambangan	202
3.5.1. Menentukan Mekanisme yang Lebih Jelas tentang Penentuan Harga Saham Divestasi	202
3.5.1.1. Penentuan Harga Saham Divestasi Menurut Penelitian <i>Natural Resource Governance Institute</i> (NRGI).....	202
3.5.1.2. Penentuan <i>Fair Market Value</i> Menurut <i>International Centre for the Settlement of Investment Disputes</i> (ICSID) Berdasarkan Kasus <i>CMS Gas v. Argentina</i>	203
3.5.1.3. Penentuan <i>Fair Market Value</i> Perusahaan Tambang Emas Rusoro Berdasarkan Kasus <i>Rusoro v. Venezuela</i>	207
3.5.2. Renegosiasi Kontrak Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Mencapai Keadilan Kontraktual.....	216
3.5.3. Mengubah Aturan Divestasi Saham	222
3.5.4. Divestasi Saham Tanpa Pembelian.....	231
BAB IV PENUTUP	240
4.1. Simpulan	240
4.2. Saran.....	242
DAFTAR BACAAN.....	243
LAMPIRAN	266
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	266
PENELITIAN.....	267
FORUM ILMIAH	268
PUBLIKASI	269